

LAMPIRAN  
NOMOR :  
TANGGAL :

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR .... TAHUN ....  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2020-2040**

No	RANPERDA AWAL	HASIL PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1.	Judul: RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2020-2040	Judul: RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2022- 2042	Disesuaikan
2.	Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri	Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana	

	Kabupaten Jeneponto Tahun 2020-2040	Pembangunan Industri Kabupaten Jeneponto Tahun 2022-2042	
3.	<p>Mengingat:</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 -2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 Nomor 283)</p>	<p>Mengingat:</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara <b>Republik Indonesia</b> Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara <b>Republik Indonesia</b> Nomor 4187);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana</p>	<p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.</p>

	<p>dan</p> <p>14. Peraturan daerah kabupaten jenepono Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) kabupaten Jenepono Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kkabupaten Jenepono Tahun 2012 Nomor 210)</p>	<p>Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jenepono Tahun 2018 -2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jenepono Tahun 2019 Nomor 283, <b>Tambahan Lembaran Daerah Nomor...</b>) dan;</p> <p>14. Peraturan Daerah Kabupaten Jenepono Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) kabupaten Jenepono Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Jenepono Tahun 2012 Nomor 210, <b>Tambahan Lembaran Daerah Nomor...</b>)</p>	
4.	<p>Menetapkan:</p> <p><b>PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2020-2040</b></p>	<p>Menetapkan:</p> <p><b>PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2022-2042</b></p>	Disesuaikan
5.	<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah...dst</li> <li>2. Bupati adalah...dst</li> </ol> <p>15. Industri Unggulan Daerah, yaitu Industri</p>	<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah adalah...dst</li> <li>2. Daerah adalah...dst</li> <li>3. Bupati adalah...dst</li> </ol>	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

	<p>prioritas...dst</p> <p>16. Industri Pendukung, yaitu industri prioritas yang bersifat sebagai bisnis...dst</p> <p>17. Industri Hulu, yaitu Industri...dst</p>	<p>15. Industri Unggulan Daerah adalah...dst</p> <p>16. Industri Pendukung adalah...dst</p> <p>17. Industri Hulu adalah...dst</p>	
6.	<p>Pasal 2</p> <p>Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:</p> <p>a. Maksud dan tujuan ...dst</p>	<p>Pasal 2</p> <p>Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:</p> <p>a. Maksud dan tujuan ...dst</p>	<p>Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</p>
7.	<p>Pasal 3 Ayat:</p> <p>(1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah...dst</p>	<p>Pasal 3 Ayat:</p> <p>(1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini yaitu...dst</p>	<p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011</p>
8.	<p>Pasal 4 Ayat:</p> <p>(3) Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dijabarkan dalam <i>Roadmap</i> (peta jalan), yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Pasal 4 Ayat:</p> <p>(3) Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dijabarkan dalam <i>Roadmap</i>, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Disesuaikan</p>

9.	<p>Pasal 5 Ayat:</p> <p>(2) RPIK sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jeneponto</p>	<p>Pasal 5 Ayat:</p> <p>(2) RPIK sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto</p>	Disesuaikan
10.	<p>Pasal 8 Ayat:</p> <p>(3) Pemangku kepentingan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terdiri dari:</p> <p>(4) Penyelenggaraan kerjasama, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama daerah.</p>	<p>Pasal 8 Ayat:</p> <p>(3) pemangku kepentingan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:</p> <p>4) Penyelenggaraan kerjasama, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), mengacu pada peraturan <b>ketentuan</b> peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama daerah.</p>	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
11.	<p>Pasal 12</p> <p>Pemantauan dan Evaluasi</p>	<p>Pisahkan Pasal Pemantauan dengan pasal Evaluasi serta cantumkan berapa kali dalam 1 (satu) tahun dilakukan Pemantaun dan Evaluasi</p>	Disesuaikan

12.	Pasal 13	Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2018 pasal 25	Permendagri Nomor 113 Tahun 2018
13.		<p style="text-align: center;">BAB</p> <p>PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  disesuaikan dengan ruang lingkup sesuai  dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2018</p>	Permendagri Nomor 113 Tahun 2018